

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten selama periode 2019-2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian, di mana meskipun di Provinsi Banten sudah terdapat penelitian mengenai PAD, namun penelitian ini menggunakan variabel dependen yang berbeda yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan data panel yang mencakup 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten selama periode 6 tahun yaitu 2019-2024, sehingga diperoleh total 48 observasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa pengaruh positif ini sangat didorong oleh kinerja Pendapatan Pajak Daerah yang berfungsi sebagai kontributor utama penerimaan daerah, di mana terdapat disparitas kontribusi yang tajam antara wilayah kota dan kabupaten. Sebaliknya, seluruh komponen pendapatan transfer (DAU, DAK, dan DBH) menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya aliran dana dari pemerintah pusat justru menurunkan insentif daerah untuk mengoptimalkan potensi fiskal mandirinya

Berdasarkan temuan ini, pemerintah daerah disarankan untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dengan berfokus pada optimalisasi Pajak Daerah melalui kebijakan yang mendukung penguatan basis pajak lokal yang sangat diperlukan untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan yang berkelanjutan di Provinsi Banten.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Provinsi Banten